



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Pendahuluan

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Pengembangan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, walaupun dalam pengembangannya menghadapi permasalahan-permasalahan yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Perbandingan relatif tingkat daya saing antar daerah dilakukan untuk melihat sejauh mana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan wilayahnya.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan, dimana yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan manusia pada masa kini tanpa melupakan pemenuhan kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut sudah menjadi tujuan dalam pembangunan dan pengembangan kota dan kabupaten di Indonesia.

Dalam menciptakan kota dan kabupaten yang berkelanjutan, diperlukan lima prinsip dasar, yaitu *environment (ecology)*, *economy (employment)*, *equity*, *engagement and energy*. Berdasarkan *World Bank Institute* (2001), pencapaian kota berkelanjutan dapat dirangkum ke dalam lingkup yang lebih mikro dengan keempat parameter yang terdiri atas *livability*, *competitiveness*, *bank ability*, *good governance and management*. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.



Dalam era desentralisasi dan globalisasi, peningkatan daya saing yang berbasis pada pengetahuan, teknologi dan inovasi menjadi penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Dalam globalisasi, tatanan sistem ekonomi baru yang dihadapi memiliki ciri yang cukup berbeda dengan tatanan ekonomi lama. Perbedaan tersebut terlihat baik dari karakteristiknya maupun peranan dari para pelakunya. Dalam tatanan ekonomi baru, persaingan yang terjadi adalah persaingan global, persaingan antar daerah tinggi, dan sumber keunggulan daya saing berasal dari inovasi, kualitas, waktu penyampaian ke pasar, dan biaya.

Daerah akan mengembangkan suatu keunggulan kompetitif berdasarkan kemampuan inovasi, dan vitalitas ekonomi merupakan hasil langsung dari persaingan industri lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta, secara administratif terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY secara geostrategis terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sehingga dapat dikatakan Daerah Istimewa Yogyakarta dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Indikator Pembangunan

2.2.1. Indikator Moneter

(a) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita selain digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan NSB digunakan pula sebagai indikator pembangunan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. Namun demikian, kita harus hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita itu sebagai salah satu indikator pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat yang mengatakan pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan



pendapatan riil saja, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap serta harus disertai pula oleh perubahan-perubahan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.

Tetapi apapun kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, pendekatan ini masih sangat cocok untuk digunakan dan mudah untuk dipahami, dan mungkin pendapatan per kapita adalah indikator pembangunan satu-satunya yang “terbaik” yang ada saat ini. Pendekatan ini juga mempunyai suatu kelebihan, dimana memfokuskan pada *raison d’etre* dari pembangunan, yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah suatu proxy yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi pendapatan per kapita masih tetap bisa digunakan sebagai suatu titik awal untuk pengklasifikasian tingkat-tingkat pembangunan, dan sudah tentu pula dapat digunakan untuk identifikasi kebutuhan pembangunan.

(b) Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih

William Nordhaus dan James Tobin (1972) menyempurnakan nilai-nilai GNP dalam upaya memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan mengenalkan konsep *Net Economic Welfare* (NEW). Penyempurnaan nilai-nilai GNP itu dilakukan dengan dua cara yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

Koreksi positif mengharuskan kita memperhatikan waktu senggang (*leisure*) dan perkembangan sektor informal. Waktu senggang berkaitan dengan jumlah jam kerja seminggu. Misalnya kita menjadi lebih kaya, mungkin kita akan memutuskan untuk bekerja lebih singkat seminggu, dengan harapan akan memperoleh kepuasan batin dari adanya tambahan waktu senggang untuk berekreasi.

Sementara itu, koreksi negatif adalah berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan. Lebih rendahnya GNP dari yang sebenarnya, bukanlah hal yang sulit dimengerti. Yang sulit dimengerti adalah hal-hal yang menyebabkan GNP dinilai terlalu tinggi dari pada yang sebenarnya. Bersamaan dengan produk yang bermanfaat (misalnya berupa bangunan perumahan yang nyaman), dalam GNP terkadang mencakup juga “hasil” yang merugikan, (berupa kerusakan tanah galian batu kali, polusi air dan udara yang ditimbulkan oleh pabrik semen, yang kesemuanya itu digunakan untuk membangun perumahan yang nyaman tadi).



Dari uraian di atas maka jelas bagi kita bahwa “biaya” yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam hasil produk dan harga pasar. Oleh karena itu biaya-biaya ekonomi tersebut harus dikurangkan dari nilai GN.

2.2.2. Indikator Non-Moneter

(a) Indikator Sosial

Beckerman membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam 3 kelompok yaitu:

1. Usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilakukan dalam perhitungan pendapatan nasional.
2. Usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yaitu dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Namun cara-cara pertama dan kedua memerlukan data yang lengkap untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan kembali pendapatan nasional. Data yang diperlukan tersebut sayangnya tidak tersedia di NSB. Oleh karena itu Beckerman mengemukakan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara dengan menggunakan cara yang ketiga/.
3. Usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang bersifat tidak moneter (*non-monetary indicators*) seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya.

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara dilakukan oleh *United Nations Research Institute for Social Development* (UNRISD). Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB berdasarkan sifat dari 18 jenis data berikut di tiap-tiap negara :

1. Tingkat harapan hidup
2. Konsumsi protein hewani per kapita
3. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah
4. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan



5. Jumlah surat kabar
6. Jumlah telepon
7. Jumlah radio
8. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih
9. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian
10. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi
11. Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji
12. Persentase PDB yang berasal dari industri-industri pengolahan (*manufacturing*)
13. Konsumsi energi per kapita
14. Konsumsi listrik per kapita
15. Konsumsi baja per kapita
16. Nilai per kapita perdagangan luar negeri
17. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian
18. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan dan pembangunan maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka masing-masing.

(b) Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris mengenalkan *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau Indeks Mutu Hidup (IMH). PQLI merupakan indeks komposit (gabungan) dari 3 indikator, yaitu : harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek, sedangkan 100 adalah kinerja terbaik. Begitu kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ketiga indikator, dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator. PQLI di Indonesia meningkat dari 45 pada tahun 1971, menjadi 57



pada tahun 1980, dan naik menjadi 73 pada tahun 1990. Kendati demikian, di antara negara-negara ASEAN, PQLI Indonesia termasuk yang paling rendah.

Seperti halnya PQLI, HDI mencoba meranking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan yaitu: usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang asing masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marjinal penghasilan dengan cepat.

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap 160 negara pada tahun 1990, ranking HDI semua negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) negara dengan pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,50; (2) negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79; dan (3) negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0. Negara dengan nilai HDI di bawah 0,5 berarti tidak memperhatikan pembangunan manusianya; negara dengan nilai HDI 0,51 hingga 0,79 berarti mulai memperhatikan pembangunan manusianya; negara dengan nilai HDI lebih dari 0,8 berarti amat memperhatikan pembangunan manusianya. Perlu dicatat bahwa HDI mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut. Selain itu, HDI memfokuskan pada tujuan akhir pembangunan (usia panjang, pengetahuan, dan pilihan material) dan tidak sekedar alat pembangunan (hanya GNP per kapita).

Pertumbuhan ekonomi memang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, namun pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah suatu alat yang penting. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya.

Kendati HDI memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan, Todaro memberikan beberapa catatan berikut : Pertama, pembentukan HDI sebagian didorong oleh



strategi politik yang didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan. Kedua, ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal (misalnya, tim PBB ingin menggunakan status nutrisi bagi anak berusia di bawah 5 tahun sebagai indikator kesehatan yang ideal, tetapi datanya tidak tersedia). Ketiga, nilai HDI suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut. Keempat, alternatif pendekatan yang memandang ranking GNP per kapita, dan kemudian melengkapinya dengan indikator sosial lain masih dihargai. Kelima, kita harus selalu ingat bahwa indeks ini merupakan indikator pembangunan yang relatif, bukan absolut, sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara miskin tidak akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya.

(c) *Millenium Development Goals*

Pada *Millenium Summit* bulan September 2000, pernyataan PBB menegaskan kembali komitmen mereka untuk menciptakan dunia dengan pembangunan yang berkelanjutan dan menghilangkan kemiskinan sebagai prioritas tertinggi. *Millenium Development Goals* (MDG) berkembang dari persetujuan dan resolusi konferensi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh PBB sepuluh tahun silam. Tujuan-tujuan tersebut telah diterima secara umum sebagai kerangka pengukuran kemajuan pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut menitikberatkan pada usaha dari masyarakat dunia dalam mencapai kemajuan-kemajuan signifikan yang dapat diukur dalam kehidupan mereka. Mereka menciptakan suatu ukuran untuk mengukur hasil-hasil, tidak hanya untuk negara sedang berkembang tetapi juga untuk negara-negara kaya yang membantu mendanai program-program pembangunan dan untuk institusi-institusi multilateral yang membantu negara-negara menerapkan program-program tersebut. Tujuh tujuan pertama dari MDG diterapkan dan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dalam segala bentuknya. Sedangkan tujuan terakhir MDG merupakan alat untuk mencapai tujuh tujuan yang pertama.

Banyak diantara negara-negara termiskin akan membutuhkan tambahan pendampingan dan harus mencari negara kaya untuk menyediakan pendampingan. Negara-negara yang miskin dan mempunyai beban hutang yang berat akan membutuhkan lebih banyak bantuan dalam rangka mengurangi beban hutang mereka. Dan semua negara akan



diuntungkan jika hambatan-hambatan dalam perdagangan dikurangi, sehingga memungkinkan pertukaran barang dan jasa yang lebih bebas. Untuk negara-negara termiskin, beberapa tujuan dalam MDG mungkin sulit tercapai. Bahkan di negara-negara yang kaya sekalipun mungkin terdapat wilayah atau kelompok yang tertinggal. Jadi negara-negara harus menentukan tujuan mereka sendiri dan bekerja untuk meyakinkan bahwa masyarakat miskin termasuk dalam kelompok yang diuntungkan oleh adanya pembangunan.

Tabel 2.1.
Millenium Development Goals (MDG)

Tujuan-tujuan dan target-target		Indikator-indikator
Tujuan 1	Membasmi kemiskinan dan kelaparan	
	Dalam kurun waktu 1990 – 2015 proporsi penduduk yang berpenghasilan kurang dari \$1 sehari berkurang setengah	<ul style="list-style-type: none">▪ Proporsi penduduk berpenghasilan kurang dari \$1 per hari▪ Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap ratio</i>)▪ Share seperempat penduduk termiskin dalam konsumsi nasional
	Dalam kurun waktu 1990 – 2015 proporsi penduduk yang menderita kelaparan berkurang setengah	<ul style="list-style-type: none">▪ Mencegah kekurangan berat badan pada anak berusia dibawah lima tahun▪ Proporsi penduduk dibawah batas minimum konsumsi makanan berenergi
Tujuan 2	Mencapai pendidikan dasar	
	Pada tahun 2015, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan mampu menyelesaikan pelajaran di pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none">▪ Rasio keikutsertaan (<i>enrollment ratio</i>) di pendidikan dasar▪ Proporsi murid yang memulai studi di kelas 1 dan mencapai kelas 5▪ Tingkat melek huruf untuk usia 15 – 24 tahun
Tujuan 3	Memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	
	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling tidak pada tahun 2005, dan dalam semua tingkatan pendidikan pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none">▪ Rasio anak perempuan terhadap laki-laki di pendidikan dasar, menengah, dan atas▪ Rasio perempuan melek huruf terhadap laki-laki melek huruf pada usia 15 – 24 tahun▪ Share perempuan dalam pekerja sektor non pertanian▪ Proporsi perempuan yang duduk di parlemen
Tujuan 4	Mengurangi angka kematian anak	
	Dalam kurun waktu 1990 – 2015, angka kematian anak turun dua pertiga	<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat kematian anak berusia dibawah lima tahun▪ Angka kematian bayi▪ Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak



Analisis Daya Saing Daerah

Tujuan-tujuan dan target-target		Indikator-indikator
Tujuan 5	Meningkatkan kesehatan ibu	
	Dalam kurun waktu 1991 – 2015, angka kematian ibu melahirkan turun tiga perempat	<ul style="list-style-type: none"> Ratio kematian ibu melahirkan Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih
Tujuan 6	Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya	
	Menghentikan penyebaran HIV/AIDS pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah HIV pada wanita hamil berusia 15 – 24 tahun Tingkat penggunaan kontrasepsi Jumlah anak yatim akibat HIV/AIDS
	Menghentikan penyebaran penyakit malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> Mencegahan dan tingkat kematian akibat malaria Proporsi penduduk yang berada dalam daerah rawan malaria yang menggunakan pencegah malaria Ukuran pencegahan dan pengobatan malaria Pencegahan dan tingkat kematian akibat Tuberculosis Proporsi kasus tuberculosis yang terdeteksi dan disembuhkan dengan DOTS
	Menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program dan memperbaiki kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan lahan hutan Perlindungan lahan untuk menjaga keragaman hayati GDP per penggunaan energi Emisi karbondioksida per kapita
	Sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk yang hidup tanpa air bersih berkurang setengah	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penduduk dengan akses yang berkelanjutan terhadap sumber air yang sehat
	Pada tahun 2020, paling tidak 100 juta penghuni permukiman kumuh telah mengalami perbaikan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi penduduk dengan akses sanitasi yang baik Proporsi penduduk dengan akses terhadap kedudukan yang tetap (<i>tenure</i>)
Tujuan 7	Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan	
	Mengembangkan perdagangan dan sistem keuangan yang terbuka, berdasar aturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif (termasuk komitmen terhadap <i>good governance</i> , pembangunan, dan pengurangan kemiskinan, baik nasional maupun internasional)	Beberapa dari indikator-indikator yang disebutkan berikut ini akan diawasi secara terpisah untuk negara-negara terbelakang (<i>least developed countries</i>), Afrika, negara-negara-negara tanpa garis pantai (<i>landlocked countries</i>), dan negara-negara kepulauan kecil (<i>small island developing states</i>).
	Official Development Assistance (ODA)	
	Memusatkan perhatian pada kebutuhan kebutuhan khusus untuk negara-negara yang belum maju (termasuk akses terhadap kebebasan tarif dan kuota untuk program penguatan ekspor dalam rangka meringankan hutang HIPC dan pembatalan	<ul style="list-style-type: none"> Net ODA dalam persentase Pendapatan Nasional negara donor DAC Proporsi ODA untuk jasa-jasa sosial dasar (pendidikan dasar, pemeliharaan kesehatan dasar, nutrisi, air bersih, dan sanitasi) Proporsi ODA yang tidak mengikat



Tujuan-tujuan dan target-target	Indikator-indikator
hutang bilateral, dan lebih banyak lagi bantuan ODA ditujukan untuk pengurangan kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi ODA untuk lingkungan di negara-negara kepulauan kecil (<i>small island developing countries</i>) ▪ Proporsi ODA untuk sektor transportasi di negara-negara yang tidak mempunyai garis pantai (<i>landlocked countries</i>).
Akses pasar	
Memusatkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara yang tidak mempunyai garis pantai (<i>landlocked countries</i>) dan negara-negara kepulauan kecil (<i>small island developing states</i>) (melalui Barbados Programme and 22nd General Assembly provision)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi ekspor (berdasarkan nilai, tidak termasuk pertahanan) yang bebas tarif dan kuota ▪ Rata-rata tarif dan kuota dalam produk pertanian, tekstil dan pakaian ▪ Subsidi pertanian domestik dan ekspor produk pertanian di negara anggota OECD ▪ Proporsi ODA yang disediakan untuk membantu membangun kapasitas perdagangan
Debt sustainability	
Secara komprehensif menangani masalah hutang dari negara-negara terbelakang (<i>least developed countries</i>) melalui tindakan-tindakan yang bersifat nasional maupun internasional agar hutang dapat dikelola dalam jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proporsi hutang bilateral pemerintah HIPC yang dibatalkan ▪ Debt service sebagai persentase dari ekspor barang dan jasa ▪ Proporsi ODA yang disediakan untuk pengurangan hutang ▪ Jumlah negara dalam kelompok HIPC yang dapat menyelesaikan hutangnya
Lainnya	
<p>Dalam kerjasama dengan negara sedang berkembang, pengembangan dan pengimplementasian strategi-strategi pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.</p> <p>Dalam kerjasama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses untuk mendapatkan obat-obatan yang diperbolehkan dan penting (<i>essential</i>) di negara sedang berkembang.</p> <p>Dalam kerjasama dengan sektor swasta, memungkinkan diperolehnya manfaat dari teknologi baru, terutama informasi dan komunikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengangguran dari penduduk berusia 15 – 24 tahun ▪ Proporsi penduduk dengan akses terhadap obat-obat yang diperbolehkan dan penting ▪ Jumlah sambungan telepon per 1000 orang ▪ Jumlah komputer per 1000 orang

Sumber : <http://www.developmentgoals.org/About the goals.htm>



(d) Indikator Pembangunan Berkelanjutan Dari Kementerian Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan telah dijalankan dengan cara yang berkelanjutan (*sustainable*), telah dikembangkan beberapa metodologi untuk mengukurnya. Pada tahun 2005, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.206 Tahun 2005, tentang Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih, yang didalamnya juga dicantumkan indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan versi Kementerian Lingkungan Hidup tersebut menggunakan empat indikator dengan beberapa sub indikator. Adapun empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan Lingkungan

- a. Keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan konservasi atau diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam
 - (i) Terjaganya keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis
 - (ii) Tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan yang berlaku, nasional dan lokal (tidak menimbulkan pencemaran udara, air, tanah)
 - (iii) Terjaganya keanekaragaman hayati (genetik, spesies, dan ekosistem) dan tidak terjadi pencemaran genetika
 - (iv) Dipatuhinya peraturan tata guna lahan atau tata ruang
- b. Keselamatan dan kesehatan masyarakat lokal
 - (i) Tidak menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan
 - (ii) Dipatuhinya peraturan keselamatan kerja
 - (iii) Adanya prosedur yang terdokumentasi yang menjelaskan usaha-usaha yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan mengatasi bila terjadi kecelakaan

2. Keberlanjutan Ekonomi

- a. Kesejahteraan masyarakat lokal
 - (i) Tidak menurunkan pendapatan masyarakat lokal
 - (ii) Adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan dampak penurunan pendapatan bagi sekelompok masyarakat
 - (iii) Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah masalah PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku



- (iv) Tidak menurunkan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat lokal

3. Keberlanjutan Sosial

- a. Partisipasi masyarakat
 - (i) Adanya proses konsultasi ke masyarakat lokal
 - (ii) Adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap komentar, keluhan masyarakat lokal
- b. Proyek tidak merusak integritas sosial masyarakat
 - (i) Tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat lokal

4. Keberlanjutan Teknologi

- (i) Terjadi Alih Teknologi
- (ii) Tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dalam hal pengetahuan dan pengoperasian alat (*know-how*)
- (iii) Tidak menggunakan teknologi yang masih bersifat percobaan dan teknologi usang
- (iv) Mengupayakan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan teknologi lokal

(e) Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sementara itu pada tahun 2008, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator yang ada di dalam Peraturan Pemerintah ini pada hakekatnya adalah indikator keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator keberhasilan pembangunan versi PP 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci Yang Digunakan Untuk EKPOD

HASIL AKHIR TUJUAN OTONOMI DAERAH	
PARAMETER	INDIKATOR
PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA	INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



Analisis Daya Saing Daerah

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

FOKUS	INDIKATOR	FORMULA
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
Pertumbuhan ekonomi	a. Pertumbuhan PDRB	$\{PDRB (t+1) - PDRB (t)\} / PDRB (t) \times 100\%$
Laju Inflasi	b. Laju inflasi Propinsi	$\{Inf (t + 1) - Inf (t)\} / Inf (t) \times 100\%$
Pendapatan per kapita	c. PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{Penduduk \text{ pertengahan tahun}}$
Ketimpangan kemakmuran	d. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_i^k f p_i (F c_i + F c_{i-1})$ <p>Dimana: <i>fpi</i>= frekuensi penduduk pada kelas pendapatan ke i <i>Fc_i</i>= frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada pendapatan ke i <i>k</i> = banyak kelas <i>Fc_{i-1}</i>= frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada kelas pendapatan kelas ke i</p>
Pemerataan pendapatan	e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$ <p>YD4=Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah <i>Qi-1</i>=Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 <i>Pi</i> =Persentase kumulatif penduduk ke i <i>qi</i> =Persentase pendapatan ke i</p>
Ketimpangan regional	f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$ <p>Tingkat kabupaten/kota <i>Y_i</i> = PDRB perkapita di kecamatan i <i>Y</i> = PDRB perkapita rata-rata kab/kota <i>f_i</i> = jumlah penduduk di kecamatan i <i>n</i> = jumlah penduduk di kab/kota</p>



FOKUS	INDIKATOR	FORMULA
		<p>Tingkat Propinsi</p> <p>Y_i = PDRB perkapita di kab/kota i</p> <p>Y = PDRB perkapita rata-rata Propinsi</p> <p>f_i = jumlah penduduk di kab/kota i</p> <p>n = jumlah penduduk di Propinsi</p>
2. Kesejahteraan Sosial		
Pendidikan	a. Angka melek huruf	$\frac{\text{Penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis}}{\text{Penduduk usia 15 th ke atas}} \times 100$
	b. Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan.
	c. Angka partisipasi murni	$\frac{\text{Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18 th}} \times 100$
	d. Angka partisipasi kasar	$\frac{\text{Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18 th}} \times 100$
	e. Angka pendidikan yang ditamatkan	$\frac{\text{Penduduk tamat (< SD, SD, SLTP, SLTA, Univ)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Kesehatan	a. Angka kelangsungan hidup bayi	(1 – angka kematian bayi)
	b. Angka usia harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
	c. Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$



Analisis Daya Saing Daerah

FOKUS	INDIKATOR	FORMULA
Kemiskinan	a. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	$(100 - \text{angka kemiskinan})$
Kepemilikan tanah	a. Persentase penduduk yang memiliki lahan	$\frac{\text{Penduduk memiliki lahan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Kesempatan kerja	a. Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$
Kriminalitas	a. Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$
3. Seni Budaya dan Olah Raga		
Grup kesenian	a. Jumlah grup kesenian	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
Gedung kesenian	a. Jumlah gedung kesenian	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
Klub olahraga	a. Jumlah klub olahraga	Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk
Gedung Olah Raga	a. Jumlah gedung olah raga	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan Dasar		
Pendidikan	<u>Pendidikan dasar:</u>	
	a. Angka partisipasi sekolah	$\frac{\text{Jumlah murid usia pendidikan dasar}}{\text{Jumlah penduduk usia pendidikan dasar}} \times 1000$
	b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan dasar}}{\text{Penduduk usia pendidikan dasar}} \times 10000$
	c. Rasio guru/murid	$\frac{\text{Jumlah guru pendidikan dasar}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$
	<u>Pendidikan menengah:</u>	
	a. Angka partisipasi sekolah	$\frac{\text{Jumlah murid usia pendidikan menengah}}{\text{Jumlah penduduk usia pendidikan menengah}} \times 1000$
	b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan menengah}}{\text{Penduduk usia pendidikan menengah}} \times 10000$
	c. Rasio guru terhadap murid	$\frac{\text{Jumlah guru pendidikan menengah}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 1000$



Analisis Daya Saing Daerah

	d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}}$
Kesehatan	a. Rasio posyandu per satuan balita	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1000$
	b. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
	c. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$
	d. Rasio dokter per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
	e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
Lingkungan hidup	a. Persentase penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$
	b. Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
	c. Persentase luas permukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100$
Sarana dan Prasarana Umum	a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$
	b. Rasio jaringan irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$
	c. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
	d. Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100$
	e. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$



Analisis Daya Saing Daerah

	f. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk g. Rasio rumah layak huni h. Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$ $\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
Penataan ruang	a. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}}$ $\frac{\text{Jumlah bangunan ber-IMB}}{\text{Jumlah bangunan}}$
Perhubungan	a. Jumlah arus penumpang angkutan umum b. Rasio ijin trayek c. Jumlah uji kir angkutan umum d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah $\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$ Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
2. Pelayanan Penunjang		
Penanaman modal	a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) c. Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$
KUKM	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM c. Jumlah BPR/LKM	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$ Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM aktif



Analisis Daya Saing Daerah

Kependudukan dan catatan sipil	a. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } > 17 \text{ yang berKTP}}{\text{Jumlah penduduk usia } > 17 \text{ atau telah menikah}}$
	b. Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran}}{\text{Jumlah keseluruhan bayi lahir}}$
	c. Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
Ketenagakerjaan	a. Angka partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatankerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 1000$
	b. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	$\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 1000$
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
	b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$
	c. Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 1000$
	d. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5 - 14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas}} \times 100$
KB dan KS	a. Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
	b. Rasio akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 1000$
Komunikasi dan informatika	a. Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner
	b. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	$\frac{\text{Jumlah wartel/warnet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$



Analisis Daya Saing Daerah

	c. Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah
	d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah
Pertanahan	a. Persentase luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100$
Pemberdayaan masyarakat dan desa	a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$
	b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$
	c. Jumlah LSM	Jumlah LSM yang aktif
Perpustakaan	a. Jumlah perpustakaan	Jumlah perpustakaan
	b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$
	b. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$
	c. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah pos siskamling}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$
Pemuda dan olahraga	a. Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda
	b. Jumlah organisasi olahraga	Jumlah organisasi olahraga
	c. Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan
	d. Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga



C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah		
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	a. Angka konsumsi RT per kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran RT}}{\text{Jumlah anggota RT}}$
Nilai tukar petani	a. Perbandingan faktor produksi dengan produk	$\text{NTP} = \frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	a. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan	$\frac{\text{Total pengeluaran RT non - pangan}}{\text{Total pengeluaran}} \times 100\%$
Produktivitas total daerah	a. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor: 1) Pertanian 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolahan 4) Listrik 5) Bangunan 6) Perdagangan 7) Pengangkutan dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa	<p>nilai tambah seluruh sektor per angkatan kerja</p> $\frac{\text{Nilai tambah sektor ke - i}}{\text{Jumlah angkatan kerja}}$ <p>dimana i= sektor 1 s/d sektor 9</p>
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
Aksesibilitas daerah	a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	$\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jumlah kendaraan}}$ <p>Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum</p> <p>Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun</p>
Penataan wilayah	a. Ketaatan terhadap RTRW b. Luas wilayah produktif c. Luas wilayah industri d. Luas wilayah banjir e. Luas wilayah kekeringan	<p><i>Realisasi peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah – RTRW/Rencana Peruntukan</i></p> $\frac{\text{Jumlah luas wilayah ke - i}}{\text{Jumlah luas keseluruhan wil.budidaya}} \times 100$ <p><i>i= wilayah produktif, industri, banjir, kekeringan dan perkotaan</i></p>



Analisis Daya Saing Daerah

	f. Luas wilayah perkotaan	
Fasilitas bank dan non bank	a. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya b. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya	Jumlah dan jenis bank dan cabang-cabangnya Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya
Ketersediaan air bersih	a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$
Fasilitas listrik dan telepon	a. Rasio ketersediaan daya listrik b. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik c. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Ketersediaan restoran	a. Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas
Ketersediaan penginapan	a. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas
3. Iklim Berinvestasi		
Keamanan dan ketertiban	a. Angka kriminalitas b. Jumlah demo	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10000$ Jumlah demo dalam 1 tahun
Kemudahan perijinan	a. Lama proses perijinan	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)
Pengenaan pajak daerah	a. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Perda	a. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Status desa	a. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan berswasembada}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100$



4. Sumber Daya Manusia		
Kualitas tenaga kerja	a. Rasio lulusan S1/S2/S3	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10000$
Tingkat ketergantungan	a. Rasio ketergantungan	$\frac{\text{Penduduk usia } < 15 \text{ th} + \text{usia } > 64}{\text{Penduduk usia } 15 - 64} \times 100$

(f) Indikator Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia

Bank Dunia mengembangkan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang di bagi menjadi empat aspek keberlanjutan, yaitu aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan, yang tertera dalam tabel berikut.



Tabel 2.3.
Major Areas, themes, and sub-themes from the UNCSD initiative

Major Areas	Themes	Sub-themes	
Social	Equity	Poverty Gender equality	
	Health	Nutrition status Mortality Sanitation Drinking water Healthcare delivery	
		Education	Education level Literacy
		Housing	Living conditions
		Security	Crime
		Population	Population change
	Environmental	Atmosphere	Climate change Ozone layer depletion Air quality
Land		Agriculture Forests Desertification Urbanization	
		Ocean, seas and coasts	Coastal zone Fisheries
		Fresh-water	Water quantity Water quality
Biodiversity		Ecosystem Species	
Economic		Economic structure	Economic performance Trade Financial status
		Consumption and production patterns	Material consumption Energy use Waste generation and management Transportation
Institutional	Institutional framework	Strategic implementation of sustainable development International cooperation	
	Institutional capacity	Information access Communication infrastructure Science and technology Disaster preparedness and response	

Sumber: Lisa Segnestam, Indicators of Environment and Sustainable Development, Paper No. 89, Dec 2002.

Namun dari indikator yang dikembangkan diatas belum tentu cocok dengan kondisi negara yang sedang berkembang. Hai dan kawan-kawan mengembangkan indikator yang sesuai dengan kondisi Vietnam dengan mengadopsi 53 indikator yang digunakan di Inggris, Indonesia dan Vietnam berikut :



Tabel 2.4.
Some Selected Indicators Sets

S. No.		Vietnam						Indo nesia ^d	United King- dom ^d
		Thai Nguyen province ^a	Quang Nam pro- vince ^b	Lam Dong pro- vince ^c	A natio- nal level ^d	A pro- vincial level ^d			
1	GDP per person	x	x	x	x	x	x		
2	GDP	x	x	x	x	x	x	x	
3	Agriculture, forestry, and fishery share in GDP		x	x					
4	Industry and construction fishery share in GDP		x	x					
5	Service share in GDP		x	x					
6	Economic structures	x		x	x	x			
7	Rate of agricultural labour in the total labour	x	x		x	x			
8	Investment share in GDP			x		x			x
9	Total ODA and FDI given in the total investment	x				x			
10	Research and technology share in GDP	x				x			
11	Investment share for education in GDP	x				x			
12	Rate between revenue and expense				x				
13	Rate of export and import	x			x	x			
14	Rate of foreign investment				x				
15	Rate of unpaid share in GDP					x			
16	Rate of energy use and GDP	x				x			
17	Waste recycling and reuse	x				x			
18	Total population				x	x			
19	Population growth rate	x	x	x	x				
20	Percent of population living below poverty line	x	x	x	x	x	x		
21	Gini index of income inequality	x				x	x		
22	Ratio of average female wage to male wage				x	x	x		
23	Income distribution								x
24	Children reaching grade 5 of primary education	x	x	x	x	x			
25	Children reaching grade 9 of secondary education	x	x	x					
26	Children reaching grade 12 of high education	x							
27	19 years old with level 2 qualifications								x
28	Nutritional rate status of five	x	x	x		x	x		
29	Mortality rate under five years old		x				x		
30	Against infectious childhood diseases		x	x					
31	Percent of population with access to primary health care facilities				x		x		
32	Maternal mortality rate	x				x			
33	Life expectancy at birth		x		x	x	x	x	
34	Unemployment rate						x		
35	Unemployment rate between town and countryside		x			x			
36	Percent of population with access to safe water	x	x	x	x	x	x		
37	Number of household with adequate disposal sewage facilities		x		x		x		
38	Adult literacy rate	x			x	x	x		
39	Number of school years						x		
40	Average expense per capita						x		
41	Rate of students per 1,000 inhabitants					x			
42	Rate of trained labour	x	x		x	x			
43	Percent of working age people in work								x
44	Percent of population with communication facilities	x		x	x	x			
45	House's area per person in urban	x				x	x		
46	Housing conditions								x
47	Number of recorded crimes per 100,000 population	x			x	x	x	x	
48	Population density						x		
49	Number of recorded traffic accident per 100,000 population	x			x	x			
50	Percent of forest area	x	x	x	x	x	x		
51	Percent of protected area	x	x	x	x	x			
52	River water quality								x
53	Populations of wild bird								x







Tabel 2.5.

Indikator Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta

Aspek	Parameter	Indikator	Penilaian
Ekonomi (5)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB per kapita • PDRB per sektor , NTP, konsumsi per kapita • Inflasi • Kontribusi investasi terhadap PDRB 	Persen Persen Persen Persen Persen	
Sosial (15)	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk dibawah garis Kemiskinan • Indeks Gini • Angka kekurangan gizi • Angka kematian bayi • Ketersediaan pelayanan puskesmas dan posyandu • Angka harapan hidup • Angka kematian bayi • Angka kematian ibu melahirkan • Angka pengangguran • Proporsi penduduk pada air bersih • Proporsi penduduk pada sanitasi • Angka buta huruf • APK dan APS • Belanja per kapita • Angka kriminalitas 	Persen Indeks Persen Persen Rasio unit/org Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	
Lingkungan (5)	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi area wilayah hutan • Proporsi kawasan lindung • Polusi air • Polusi udara • Pengolahan sampah padat 	Persen Persen BOD (mg/l) COD (mg/l) CO (ug/m ³) Pb (ug/m ³) Persen	
Kelembagaan (5)	<ul style="list-style-type: none"> • Media Massa • Akses pada telpon • Akses pada internet • Kebijakan SD • Kesiapan pada Bencana 	Jumlah media massa Unit/org Unit/org Ada/tidaknya dokumen perencanaan	



Sedangkan penilaian dilakukan dengan memberikan symbol berikut :

-  = Clear improvement
-  = Little or no change
-  = Clear deterioration
-  = Insufficient or no comparable data

2.3. Daya Saing Daerah

Istilah daya saing (*competitiveness*) didefinisikan dan dipahami beragam oleh banyak pihak. Porter (1990) mengomentari perbedaan pandangan tentang daya saing ini sebagai berikut: *"There is no accepted definition of competitiveness. Whichever definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it."* Namun pada intinya terdapat tiga tataran berbeda tentang daya saing yang perlu dicermati dalam perspektif ekonomi, yaitu: mikro, meso, dan makro.

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

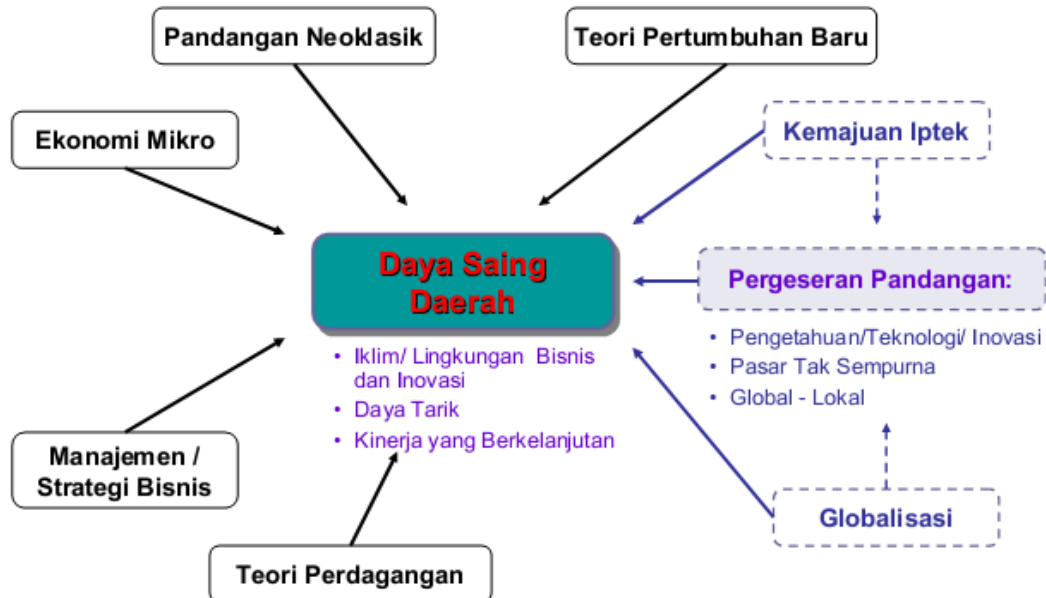
Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan suatu perekonomian" daripada "kemampuan sektor swasta atau perusahaan".
2. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.



3. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
4. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup.

Sedangkan pengertian daya saing menurut KPPOD yang mengungkapkan daya saing daerah dengan tekanan perhatian pada “daya tarik investasi di daerah” yang mencermati perkembangan dari tahun ke tahun. Penelaahan pada dimensi yang lebih umum tentang daya saing daerah dilakukan oleh PPSK-BI dan FE-UNPAD (hanya dilakukan sekali, lihat Abdullah, et al, 2002). Sementara itu, P2KTPW – BPPT (lihat misalnya Widayanto, 2003) melakukan kajian daya saing wilayah dalam perspektif teknologi, yaitu dengan melihat faktor kemampuan dan iklim teknologi. Teori/konsep tentang (berkaitan dengan) daya saing mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara sederhana, perkembangan teori/konsep tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan pemahaman tentang daya saing daerah (seperti diilustrasikan pada Gambar 6.1).

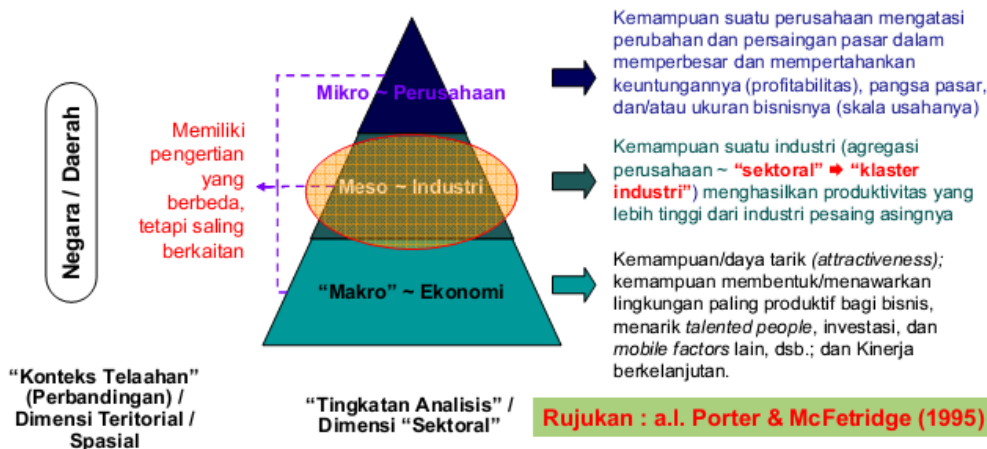


Gambar 2.1. Perspektif Teoritis Daya Saing Daerah

Simplifikasi dari pengertian daya saing adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. Secara umum, definisi "mikro" tentang daya saing adalah pengertian yang paling mudah diterima secara luas oleh banyak pihak. Di sisi lain, definisi "makro" tentang daya saing merupakan pengertian yang paling sulit memperoleh "kesepakatan penafsiran" atau kesepahaman oleh banyak kalangan. Beberapa bahasan tentang daya saing dapat dipelajari lebih lanjut antara lain dalam Porter (1990), McFetridge (1995), Schienstock (1999), Porter dan Stern. (2001), dan Gardiner (2003).

Upaya penelaahan daya saing yang dikembangkan di Indonesia antara lain dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, c.q., P2KTPW, dan Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI) yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (FE-UNPAD) adalah di antara yang melakukan hal demikian dewasa ini.

- **Beragam definisi ~ perbedaan keberterimaan (*acceptability*)** oleh berbagai kalangan (misalnya akademisi, praktisi, pembuat kebijakan).
- “Pembedaan” pada beragam tingkatan:
 - Perusahaan (mikro) : definisi yang paling “jelas.”
 - Industri (meso) : walaupun beragam, umumnya dapat dipahami: pergeseran perspektif pendekatan “sektoral” ➔ pendekatan “klaster industri.”
 - Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan dan kritik (latar belakang teori).



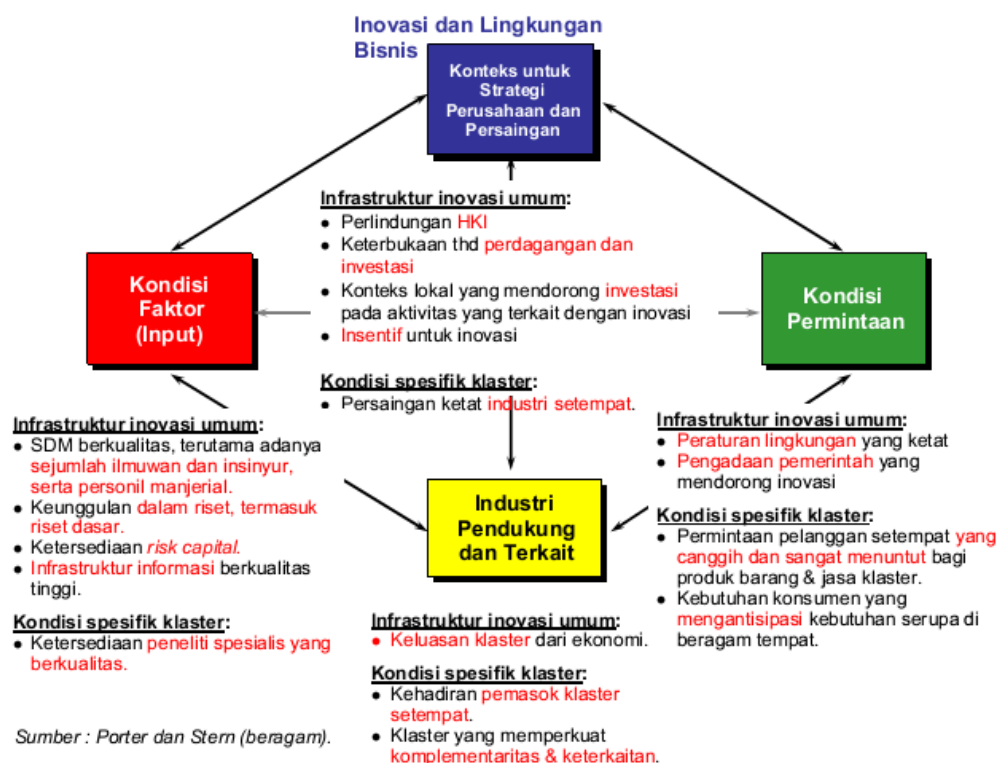
Gambar 2.2. Simplifikasi Pengertian Daya Saing

Apabila pengertian daya saing dipandang sebagai suatu konsepsi tentang proses dinamis yang berkembang dari waktu ke waktu, maka tentunya penelaahan pada beberapa dimensi yang relevan dan sangat penting berkaitan dengan sisi masukan, proses, dan keluaran terkait dengan daya saing merupakan hal yang penting untuk digali. Perlu dipahami bahwa upaya untuk menelaah daya saing terus dikembangkan oleh banyak pihak dan mengungkapkan tekanan dan cakupan yang berbeda. Sebagai ilustrasi, Porter dan Stern. (2001) menyampaikan bagaimana kerangka kapasitas inovatif dan kerangka determinan daya saing (*the four diamonds framework*) digunakan dalam menganalisis klaster industri tertentu, seperti diilustrasikan pada Gambar berikut.



Gambar 2.3. Kerangka dengan Tataran Berbeda Tentang Pengertian Daya Saing Daerah

Penyusunan Data Dasar Sistem Inovasi, Daya Saing, dan Kohesi Sosial Daerah



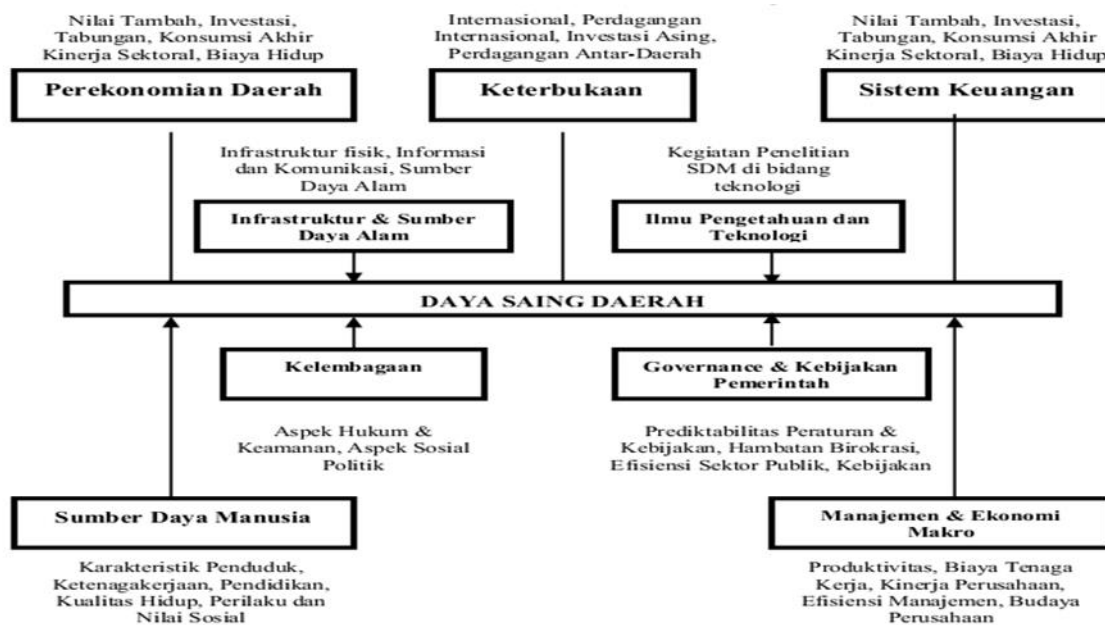
Gambar 2.4. Kapasitas Inovatif dan Kerangka Determinan Daya Saing

2.3.1. Indikator Utama Daya Saing Daerah

Studi yang dilakukan oleh Pitter Abdullah, 2002 dengan judul Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia menyebutkan bahwa indikator penentu daya saing daerah adalah Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber daya Manusia, Kelembagaan, Governance dan Kebijakan Pemerintah, dan Manajemen dan Ekonomi Makro. Indikator makro daya saing merupakan jaringan antar indikator dan sub-sub indikator yang saling *intercorect*, saling hubungan secara terikat dan terkait (*inheren dan cohern*) antar dan lintas indikator dan sub indikator, yang pada implementasinya memerlukan pengelolaan yang terintegratif, terencana dan konsisten serta berkesinambungan diantara sembilan indikator penentu daya saing. Implementasi terintegrasi, mengandung makna bahwa langkah-langkah yang ditempuh



untuk mewujudkan perekonomian daerah secara makro sudah barang tentu melibatkan semua pihak, baik institusi pemerintah daerah, swasta dan lembaga sosial, seta pihak-pihak secara langsung dan tidak langsung secara nyata andil dalam pergerakan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Terencana, asumsi langkah perencanaan adalah untuk memperkecil kegagalan, artinya aktivitas pengembangan daya saing akan gagal total tanpa perencanaan, dan peluang untuk berhasil lebih besar apabila diawali dengan perencanaan yang baik. Konsisten, menunjukan kepada langkah sentripetal yakni gerak yang mengarah sesuai perencanaan atau gerak taat asas, tidak mengerjakan yang tidak terencanakan, taat asas merupakan perwujudan dari konsistensi sebuah kesepakatan, tidak merubah kesepakatan tanpa kesepakatan berikutnya, perencanaan adalah kesepakatan. Adapun berkesinambungan merupakan pekerjaan tiada henti, akan tetapi terus menerus dilakukan pada tahun pertama diikuti tahun kedua dan seterusnya. Indikator dan sub-indikator dari daya saing daerah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Pitter Abdullah, 2002

Gambar 2.5. Indikator Utama Penentu Daya Saing Daerah



Masing-masing indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b) Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c) Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d) Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional dan internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
- b) Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
- c) Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia.
- d) Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.



- e) Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional.

3. Sistem Keuangan

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
- b) Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b) Modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c) Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkannya dalam aktivitas ekonomi yang



meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip di bawah ini:

- a) Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
- b) Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
- c) Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

6. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam kal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b) Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c) Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d) Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan maupun mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.



- b) Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
- c) Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

8. *Governance* dan Kebijakan Pemerintah

Indikator *Governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
- b) Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
- c) Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
- d) Efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
- e) Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.

9. Manajemen Ekonomi Makro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi makro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah diantaranya adalah:



- a) Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
- b) Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah dimana perusahaan tersebut berada.
- c) Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
- d) Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
- e) Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

2.3.2. Variabel-Variabel Penentu Daya Saing

Secara umum, penelitian ini menggunakan variabel-variabel penentu daya saing seperti yang dikemukakan oleh Pitter Abdullah, 2002. Namun demikian, indikator dalam setiap variabel akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta data yang tersedia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel-variabel tersebut adalah:

- 1. variabel perekonomian,
- 2. keterbukaan perekonomian daerah
- 3. infrastruktur
- 4. sumber daya alam,
- 5. sumber daya manusia;
- 6. ilmu pengetahuan dan teknologi
- 7. iklim sosial, politik, dan aspek keamanan
- 8. kualitas administrasi pemerintah daerah
- 9. pengelolaan perusahaan/industri daerah



2.4. Peringkat Daya Saing Indonesia

2.4.1. Peringkat Indonesia

Peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Report 2012-2013* mengalami penurunan, dari peringkat 46 di tahun 2011/2012 turun ke peringkat 50 di tahun 2012/2013. Turunnya peringkat Indonesia dipengaruhi oleh kinerja beberapa indikator yang melemah, terutama pada yang terkait dengan variabel “institusi”, yakni suap, korupsi, etika perilaku perusahaan, kejahatan, dan terorisme. Selain itu, infrastruktur juga masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Akan tetapi, seperti tahun-tahun sebelumnya, variabel makroekonomi tetap menjadi indikator yang paling stabil dalam menopang daya saing Indonesia. Isu suap dan korupsi masih dipandang sebagai permasalahan utama dalam iklim bisnis. Terkait dengan data *most problematic factors*, dalam survey yang dilakukan oleh WEF responden diminta memilih diantara 15 faktor yang dianggap paling bermasalah untuk iklim bisnis. Hasilnya kemudian diolah (tabulasi) dan diberi bobot sesuai dengan ranking yang dipilih oleh responden. Pada tahun 2012, birokrasi dipandang sebagai *the most problematic factor* yang menggeser kedudukan korupsi yang pada tahun 2011 berada di peringkat pertama.

Konsep inefisiensi birokrasi dikaitkan dengan relasinya dengan dunia usaha. Dalam konteks dunia usaha, perilaku pemerintah dianggap sangat penting karena berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Birokrasi yang tidak efisien ditandai dengan panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, korupsi, pungutan liar, dan tidak transparannya pengadaan. Kesemuanya telah berandil dalam “ekonomi biaya tinggi” yang pada akhirnya akan menghambat laju investasi.

Adapun keseluruhan peringkat *most problematic factors* tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien
2. Korupsi
3. Infrastruktur yang tidak memadai
4. Etika kerja yang buruk
5. Peraturan buruh yang membatasi
6. Inflasi
7. Akses pada pembiayaan



Analisis Daya Saing Daerah

8. Ketidakstabilan politik
9. Peraturan mata uang asing
10. Peraturan pajak
11. Ketidakstabilan pemerintah
12. Kriminalitas dan pencurian
13. Tenaga kerja terdidik yang tidak memadai
14. Tingkat pajak
15. Rendahnya kemampuan berinovasi
16. Kesehatan umum yang buruk

Tren 5 besar peringkat the most problematic factors di Indonesia selama 4 tahun terakhir sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	2009	2010	2011	2012
1	Birokrasi pemerintah	Birokrasi pemerintah	Korupsi	Birokrasi pemerintah
2	Infrastruktur	Korupsi	Birokrasi pemerintah	Korupsi
3	Ketidakstabilan politik	Infrastruktur	Infrastruktur	Infrastruktur
4	Korupsi	Akses pembiayaan	Ketidakstabilan politik	Etika kerja buruk
5	Akses pembiayaan	Inflasi	Akses pembiayaan	Peraturan ketenagakerjaan

Adapun peringkat Indonesia untuk masing-masing *pilar competitiveness* dan tren dari tahun ke tahun sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:



Kelompok Indikator/Pilar	2009-2010 (Baseline RPJMN)	2011-2012	2012-2013	Tren (+/-)
Peringkat Daya Saing:	54	46	50	(-4)
• Makroekonomi	52	23	25	(-2)
• Kesehatan dan Pendidikan Dasar	82	64	70	(-6)
• Infrastruktur	84	76	78	(-2)
• Institusi	58	71	72	(-1)
• Pendidikan tinggi	69	69	73	(-4)
• Besaran pasar	16	15	16	(-1)
• Kesiapan teknologi	88	94	85	(+9)
• Pasar keuangan	61	69	70	(+1)
• Efisiensi pasar barang	41	67	63	(+4)
• Efisiensi pasar tenaga kerja	75	94	120	(-26)
• Inovasi	39	36	39	(-3)
• Kecanggihan bisnis	40	45	42	(+3)

Dari tabel diatas terlihat bahwa peringkat mayoritas indikator mengalami penurunan. Hanya beberapa indikator yang mengalami kenaikan peringkat, yakni Kesiapan Teknologi, Pasar Keuangan, Efisiensi Pasar Barang, dan Kecanggihan Bisnis. Sedangkan untuk indikator institusi, mengalami penurunan satu peringkat dibanding tahun sebelumnya. Khusus untuk indikator Institusi, jika ditelusuri lebih lanjut maka terdapat beberapa sub-indikator yang membentuk pilar tersebut.

Adapun pembagian sub-indikator beserta tren peringkatnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:



Analisis Daya Saing Daerah

NO		SUB-INDIKATOR	2011/2012	2012/2013	TREN
A		Public Institutions			
	1	Hak Cipta			
		1. Hak Cipta	84	82	(+2)
		2. Perlindungan HAKI	62	60	(+2)
	2	Etika dan Korupsi			
		3. <i>Kebocoran anggaran</i>	66	65	(+1)
		4. Kepercayaan thd politisi	56	60	(-4)
		5. <i>Penyuapan</i>	103	111	(-8)
	3	Undue influence			
		6. Peradilan yang bebas	76	76	-
		7. <i>Kolusi pejabat</i>	36	35	(+1)
	4	Inefisiensi Pemerintah			
		8. <i>Penyimpangan dana pemerintah</i>	34	32	(+2)
		9. <i>Beban regulasi pemerintah</i>	44	48	(-4)
		10. Efisiensi hukum dalam penyelesaian sengketa	69	66	(+3)
		11. Efisiensi hukum dalam penegakan peraturan	61	63	(-2)
		12. Transparansi pemerintah	87	82	(+5)
	5	Keamanan			
		13. Ongkos bisnis terorisme	114	121	(-7)
		14. Ongkos bisnis dari kejahatan dan kekerasan	95	98	(-3)
		15. Kriminalitas terorganisir	109	116	(-7)
		16. Kehandalan polisi	88	85	(+3)
B		Private institutions			
	6	Etika Perusahaan			
		17. Perilaku etis perusahaan	107	96	(+11)
	7	Akuntabilitas			
		18. <i>Kekuatan standar akuntansi dan pelaporan</i>	94	87	(+7)
		19. Kemampuan dewan direksi	73	62	(+11)
		20. Perlindungan thd pemegang saham minoritas	66	62	(+4)
		21. Kekuatan perlindungan investor	36	39	(-3)

Jika dilihat dengan seksama maka terlihat bahwa perbandingan jumlah sub-indikator Institusi yang mengalami kenaikan dengan yang menurun dapat dikatakan seimbang. Terdapat 12 sub-indikator yang mengalami kenaikan dan 9 sub-indikator yang mengalami penurunan. Dalam pilar institusi mengalami penurunan peringkat. Penurunan yang menonjol terkait dengan sub-indikator penyuapan, terorisme, dan kriminalitas. Sedangkan kenaikan



cukup signifikan dialami oleh sub -indikator perilaku etis perusahaan dan kemampuan dewan direksi.

2.4.2. Peringkat Negara ASEAN

Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia berada dibawah Singapura (2), Malaysia (25), Brunei (28), dan Thailand (38). Akan tetapi, posisi Indonesia masih diatas Vietnam (75), Filipina (65), dan Kamboja (79). Jika dibandingkan dengan negara BRIC, peringkat Indonesia masih dibawah Cina dan Brazil, tetapi diatas Rusia dan India. Adapun perbandingan peringkat total dan peringkat pilar Institusi di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN serta BRIC digambarkan sebagaimana tabel berikut:

No	Negara	Peringkat Beberapa Negara Anggota ASEAN					Peringkat Pilar Institusi
		2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
1	Singapura	5	3	3	2	2	1
2	Malaysia	21	24	26	21	25	29
3	Brunei	39	32	28	28	28	31
4	Thailand	34	36	38	39	38	77
5	Indonesia	55	54	44	46	50	72
6	Vietnam	70	75	59	65	75	89
7	Philippines	71	87	85	75	65	94
8	Cambodia	109	110	109	97	85	73
9	Laos	-	-	-	-	-	-
10	Myanmar	-	-	-	-	-	-
11	Brazil	64	56	58	53	48	79
12	Rusia	51	63	63	66	67	133
13	India	50	49	51	56	59	70
14	Cina	30	29	27	26	29	50

2.4.3. Peringkat Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia

Studi yang dilakukan oleh Abdullah dkk. (2002) menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peringkat 6 dari semua provinsi dan daerah istimewa yang ada di Indonesia. Studi tersebut menyebutkan bahwa variabel yang kuat mendukung posisi daya saing DIY adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen mikroekonomi. Variabel-variabel yang merupakan kelemahan bagi daya saing DIY adalah keterbukaan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Variabel-variabel yang bernilai moderat



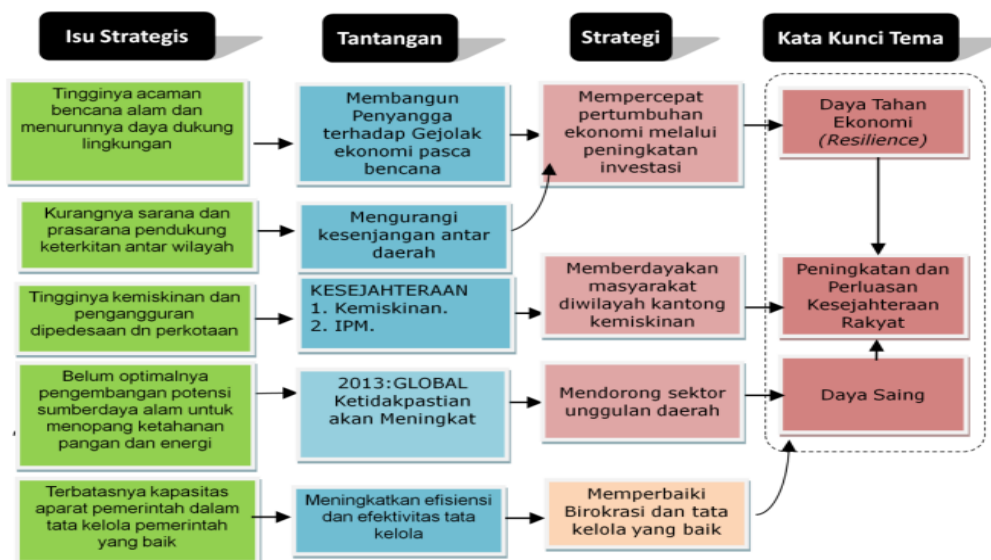
Analisis Daya Saing Daerah

adalah perekonomian daerah, sistem keuangan, kelembagaan, dan governance dan kebijakan.

2.5. Tema, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah DIY Tahun 2013

2.5.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2013 adalah: "Penguatan Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".



Gambar 2.6. Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2013

Penguatan daya saing (*competitiveness*) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik *talented people*, investasi, dan *mobile factors* lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan. Daya saing perekonomian akan dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi. Apabila kita berbicara mengenai produktivitas, maka unsurnya yang paling pokok adalah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Efisiensi menyangkut aspek kelembagaan ekonomi, terutama bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan sedikitnya hambatan dalam transaksi.



Penguatan daya tahan (*resillience*) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak). Perekonomian yang tidak mudah terombang ambing tersebut, antara lain ditandai oleh tiga ciri berikut. Pertama, adanya diversifikasi kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam keragaman sumber mata pencaharian penduduknya, sumber penerimaan daerahnya, dan sebagainya. Kedua, pelaku ekonominya mempunyai keluwesan yang tinggi (*flexibility*) dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan usaha yang dapat berubah dengan cepat. Ketiga, kerangka kebijakan dan peraturan yang mendukung (*conducive*) terciptanya iklim usaha yang sehat.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual.

2.5.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2013 adalah:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola SKPD yang lebih baik dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD (meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *Good Governance*).

2. Pendidikan;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan kualitas lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan;



- b. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan terutama di kantong-kantong kemiskinan;
- c. Pengembangan pendidikan yang berbasis multikultur untuk meningkatkan wawasan, keterbukaan, dan toleransi;
- d. Peningkatan budaya baca masyarakat;
- e. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

3. Kesehatan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan:

- a. Kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat;
- b. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

4. Penanggulangan kemiskinan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan:

- a. Kualitas pengelolaan ketenagakerjaan;
- b. Kualitas pengelolaan ketrasmigrasian;
- c. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).

5. Ketahanan pangan;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah



berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).

6. Infrastruktur;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas, pemerataan prasarana dan sarana publik terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan, serta dalam rangka meningkatkan pemanfaatan ruang. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

7. Iklim investasi dan usaha;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang adaptif. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera).

8. Energi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap energi terutama energi baru terbarukan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta efisiensi konsumsi energi. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

9. Lingkungan hidup dan bencana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang relatif tertinggal di daerahnya, sehingga



diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik).

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis, dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung).